

PERANGKAT PEMBELAJARAN

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Daftar Isi:

- 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran – RPP (1 halaman)**
- 2. Lampiran Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)**
- 3. Bahan Ajar – Modul Belajar + Presentasi**
- 4. Lembar Kerja Siswa (LKS)**
- 5. Evaluasi – Tes Formatif dan Sumatif**
- 6. Lembar Penilaian**

Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP – 1 halaman - Luring)**

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP – 1 halaman - Luring)**

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
 Kelas/Semester : XI / Ganjil
 Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
 Sub Tema : Kebijakan Moneter
 Pembelajaran ke : 1
 Alokasi Waktu : 1 x 2 Jp @ 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning*, peserta didik dapat memahami konsep kebijakan moneter secara menyeluruh; mengidentifikasi tujuan/fungsi kebijakan moneter dan menganalisis berbagai instrument kebijakan moneter, serta menjelaskan dampak dari kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut diharapkan peserta didik dapat menyajikan hasil analisa kebijakan moneter sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia terkini.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	
<p>Orientasi : Ucapan salam, doa dan presensi kehadiran Apersepsi : Mengaitkan topik kebijakan moneter dengan pengalaman hidup peserta didik dan menggali pertanyaan terkait dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi : Ice breaking – pemaparan manfaat dan tujuan pembelajaran. Pemberian Acuan : Penyampaian pokok bahasan ‘Kebijakan Moneter’ – mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan pembagian kelompok (6 kelompok @ 4-5 orang).</p>	
Kegiatan Inti (60 menit)	
Sintaks Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik diminta untuk melihat tanyangan video “Mengenal Kebijakan Moneter Bank Indonesia” dengan panduan pertanyaan kunci untuk diisi point-point penting dalam video. Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=KMPnVroI2vE ➤ Guru memberikan penjelasan “Kebijakan Moneter”
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah)	Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video dan penjelasan guru.
Data collection (pengumpulan data)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru memberikan artikel yang membahas mengenai kebijakan moneter di masa Pandemi Covid-19, diantaranya berjudul: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Ini 5 Kebijakan Moneter Bank Indonesia Atasi Dampak Virus Corona</i> 2) <i>Kebijakan Moneter di Tengah Pandemi Covid-19</i> 3) <i>Strategi Indonesia dalam Menghindari Krisis Ekonomi di Masa Pandemi</i> ➤ Guru meminta siswa untuk mencari informasi relevan dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan kelompoknya dengan panduan pertanyaan.
Data Processing (Pengolahan Data)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para siswa berkolaborasi di kelompok untuk mengolah informasi yang sudah didapatkan dan merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
Verification (Pembuktian)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. ➤ Siswa dan guru secara bersama-sama di setiap kelompok membahas jawaban-jawaban yang telah dikerjakan.
Generalization (menarik kesimpulan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik (salah satu perwakilan kelompok) menyampaikan hasil diskusi. Dan memberi kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Presentasi hasil. ➤ Tanya jawab antar kelompok.
Kegiatan Penutup (10 Menit)	
Peserta didik dengan bimbingan guru membuat rangkuman/kesimpulan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan rangkuman dari guru sebagai tambahan atau penguatan.	

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian pengetahuan :

tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda dan uraian, tes lisan yang diamati dalam proses diskusi (tanya-jawab) saat penugasan.

Penilaian keterampilan :

penilaian ini melalui proses pengamatan pada saat pengerjaan tugas dan diskusi kelompok serta presentasi hasil.

Aimas, 30 Desember 2020

Mengetahui,

Kepala Sekolah
SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen

Guru Mata Pelajaran

RD. Adrianus Gaut S.Fil

Albertus B. Buntoro, Gr. SE

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP – 1 halaman)**

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
 Kelas/Semester : XI / Ganjil
 Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
 Sub Tema : Kebijakan Fiskal
 Pembelajaran ke : 2
 Alokasi Waktu : 1 x 2 Jp @ 45 menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning*, peserta didik dapat memahami konsep kebijakan fiskal secara menyeluruh; mengidentifikasi tujuan/fungsi kebijakan fiskal dan menganalisis berbagai instrument kebijakan fiskal, serta menjelaskan dampak kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut diharapkan peserta didik dapat menyajikan hasil analisa kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia terkini.

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	
<p>Orientasi : Ucapan salam, doa dan presensi kehadiran Apersepsi : Mereview kembali pembelajaran sebelumnya mengenai kebijakan moneter dan mengaitkan topik kebijakan fiskal dengan pengalaman hidup peserta didik dan menggali pertanyaan terkait dengan pokok bahasan yang akan dipelajari hari ini. Motivasi : Ice breaking – pemaparan manfaat dan tujuan pembelajaran. Pemberian Acuan : Penyampaian pokok bahasan ‘Kebijakan Fiskal’ – mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan pembagian kelompok (6 kelompok @ 4-5 orang).</p>	
Kegiatan Inti (60 menit)	
Sintaks Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik diminta untuk melihat tanyangan video “Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia di tengah wabah Covid-19” dengan panduan pertanyaan kunci untuk diisi point-point penting dalam video. Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=kII3000qzKw&feature=youtu.be ➤ Guru memberikan penjelasan “Kebijakan Fiskal”
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah)	Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video dan penjelasan guru.
Data collection (pengumpulan data)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru memberikan artikel yang membahas mengenai kebijakan fiskal di masa Pandemi Covid-19, dengan judul: <u>“Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam Menghadapi Pandemi”</u> ➤ Guru meminta siswa untuk mencari informasi relevan dari berbagai sumber dan berdiskusi dengan kelompoknya dengan panduan pertanyaan.
Data Processing (Pengolahan Data)	➤ Para siswa berkolaborasi di kelompok untuk mengolah informasi yang sudah didapatkan dan merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
Verification (Pembuktian)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber. ➤ Siswa dan guru secara bersama-sama di setiap kelompok membahas jawaban-jawaban yang telah dikerjakan.
Generalization (menarik kesimpulan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peserta didik (salah satu perwakilan kelompok) menyampaikan hasil diskusi. Dan memberi kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Presentasi hasil. ➤ Tanya jawab antar kelompok.
Kegiatan Penutup (10 Menit)	
Peserta didik dengan bimbingan guru membuat rangkuman/kesimpulan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan rangkuman dari guru sebagai tambahan atau penguatan.	

C. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian pengetahuan :

tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda dan uraian, tes lisan yang diamati dalam proses diskusi (tanya-jawab) saat penugasan.

Penilaian keterampilan :

penilaian ini melalui proses pengamatan pada saat pengerjaan tugas dan diskusi kelompok serta presentasi hasil.

Aimas, 30 Desember 2020

Mengetahui,

Kepala Sekolah
SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen

Guru Mata Pelajaran

RD. Adrianus Gaut S.Fil

Albertus B. Buntoro, Gr. SE

LAMPIRAN:

**KOMPETENSI INTI – KI
KOMPETENSI DASAR – KD**

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

KOMPETENSI INTI – KI dan KOMPETENSI DASAR – KD

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
 Kelas/Semester : XI / Ganjil
 Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
 Alokasi Waktu : 2 x 2 Jp @ 45 menit

A. Kompetensi Inti

- **KI-1 dan KI-2:** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. **Menghayati dan mengamalkan** perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI-3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI-4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pengertian kebijakan moneter • Mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter • Menganalisis instrumen kebijakan moneter • Menjelaskan dampak kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia • Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal • Mengidentifikasi tujuan kebijakan fiskal • Menganalisis instrumen kebijakan fiskal • Menjelaskan dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia • Menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal
4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan hasil analisis tentang peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui media lisan dan tulisan

Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran
<p>Konseptual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian kebijakan moneter • Tujuan kebijakan moneter • Pengertian kebijakan fiskal • Tujuan kebijakan fiskal <p>Prosedural:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 	<p>Pendekatan : Saintifik</p> <p>Model Pembelajaran : <i>Discovery Learning</i></p> <p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menonton Video • Tanya jawab • Diskusi
Media Pembelajaran	Sumber Belajar
<p>Media : LKS - Power point</p> <p>Alat/Bahan : Spidol, papan tulis – Laptop,LCD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Ekonomi Siswa Kelas XI • Buku referensi yang relevan, • Video Berita • Lingkungan

BAHAN AJAR

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

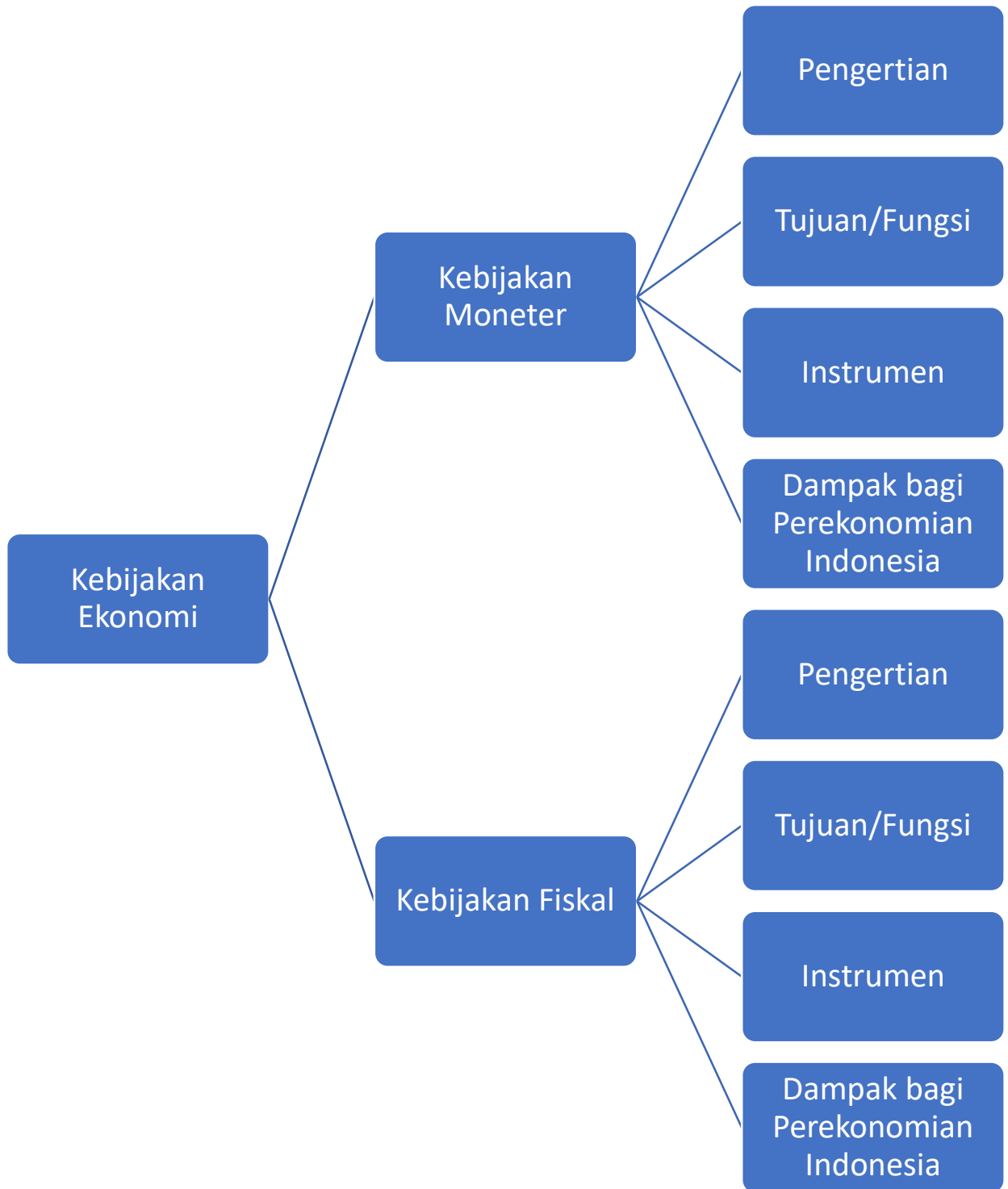


Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

PETA KONSEP





A. Pengantar

Selamat bergabung kembali dalam modul pembelajaran mandiri, semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan khususnya pada mata pelajaran Ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari masing-masing dari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Apakah kalian masih ingat materi indeks harga dan inflasi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Sementara inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Melihat kondisi indeks harga dan inflasi, apa tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut?

Pemerintah mempunyai dua cara dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan? Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah *rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya)*.

Pada bab ini kita akan mempelajari dua kebijakan pemerintah tersebut yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di suatu negara, khususnya negara kita Indonesia. Modul/bahan ajar ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama mempelajari pengertian, tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Dan pada bagian yang kedua mempelajari pengertian, tujuan dan instrumen kebijakan fiskal.

B. Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Inti:

- **KI-1 dan KI-2:** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak-anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI-3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI-4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

3.5.1 Menjelaskan pengertian kebijakan moneter

3.5.2 Mengidentifikasi tujuan kebijakan moneter

3.5.3 Menganalisis instrumen kebijakan moneter

3.5.4 Menjelaskan dampak kebijakan moneter bagi perekonomian Indonesia

3.5.5 Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal

3.5.6 Mengidentifikasi tujuan kebijakan fiskal

3.5.7 Menganalisis instrumen kebijakan fiskal

3.5.8 Menjelaskan dampak kebijakan Fiskal bagi perekonomian Indonesia

3.5.9 Menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

4.5.1 Menyajikan hasil analisis tentang peran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui media lisan dan tulisan

C. Petunjuk Umum Belajar

Petunjuk untuk Peserta Didik

Untuk dapat berhasil mempelajari modul ini:

1. Pelajarilah modul ini dengan sebaik-baiknya, hingga kamu bisa kuasai dengan baik.
2. Carilah materi di berbagai sumber untuk menambah pemahaman dan wawasan kamu tentang materi ini!

Petunjuk untuk Guru atau Tutor

Bagi rekan-rekan guru atau tutor, modul ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Modul ini dilengkapi dengan uraian materi dan rangkuman. Rekan guru atau tutor dapat mengadakan pengamatan tentang materi ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar peserta didik dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi. bagi para peserta didik.

KEGIATAN BELAJAR 1



PENGETIHAN – TUJUAN – INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

A. Tujuan dan Petunjuk Belajar

Setelah mempelajari materi tentang pengertian, tujuan dan instrumen kebijakan moneter dalam bahan ajar ini, diharapkan kamu dapat memecahkan permasalahan kontekstual terkait dengan kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi secara khusus dalam menjaga stabilitas harga.

Untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan, kamu harus membaca materi pelajaran secara berulang-ulang dan mengerjakan setiap aktivitas belajar yang tersedia. Buatlah catatan kecil untuk materi yang belum kamu pahami dan tanyakan kepada tutor atau fasilitator. Selamat belajar.

B. Uraian Materi Pembelajaran

Pengertian kebijakan moneter

Nopirin (1992) menjelaskan kebijakan moneter sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara menurut Sadono Sukirno (2012), kebijakan Moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan

Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.

Kebijakan moneter dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- Kebijakan moneter kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) atau dapat dikatakan sebagai kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*) adalah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat terjadi inflasi.
- Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary Expansive Policy*) atau dapat dikatakan kebijakan moneter uang longgar (*Easy Money Policy*) adalah kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilaksanakan pada saat terjadi deflasi.

Melalui instrumen-instrumen yang dimiliki akan terjadi perubahan jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang ini akan mempengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga.

Tujuan Kebijakan Moneter

Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, meningkatnya kesempatan kerja dan memelihara keseimbangan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Mari kita bahas satu persatu tujuan kebijakan tersebut.

- Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

Kestabilan nilai rupiah di sini mengandung dua arti yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar

b. Menjaga stabilitas harga

Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.

c. Meningkatkan kesempatan kerja

Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.

d. Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Sebelum kita membahas lebih lanjut tujuan kebijakan moneter ini, kita akan bahas sekilas mengenai neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

✓ **Neraca perdagangan** atau **neraca ekspor-impor** adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya untuk neraca negatif.

✓ **Neracapembayaran** merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk Negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial

Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika perbankan memberikan suku bunga rendah, para pengusaha khususnya pengusaha ekspor dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan jumlah eksportnya. Peningkatan jumlah ekspor tersebut akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Instrumen Kebijakan Moneter

Agar tujuan tercapai, bank sentra menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut:

a. **Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)**

Kebijakan ini dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti obligasi (ORI) dan sertifikat Bank Indonesia

b. **Politik Diskonto (Disconto Policy)**

Kebijakan ini dilakukan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga Bank. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Pengurangan jumlah uang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

c. **Cadangan kas minimum**

Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas (*cas ratio*) minimum bank umum. Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.

d. **Kebijakan kredit selektif**

Kebijakan yang dilakukan dengan cara menetapkan persyaratan kredit ketat dalam memperoleh kredit dari Bank. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Jadi ketika kebijakan ini di berlakukan maka akan mengurangi kesempatan bagi para peminjam dalam memperoleh uang dari pinjaman Bank dan dampaknya uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.

e. **Himbaun moral**

Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa. Imbauan moral bertujuan mengarahkan dan mengendalikan pihak yang berkaitan langsung dengan dunia moneter. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman.

Dampak kebijakan Moneter bagi perekonomian Indonesia adalah mempertahankan kestabilan harga; menjaga agar likuiditas sesuai kebutuhan; melancarkan transaksi perdagangan; mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian

KEGIATAN BELAJAR 2



PENGERTIAN – TUJUAN – INSTRUMEN - DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL

A. Tujuan dan Petunjuk Belajar

Setelah mempelajari materi tentang pengertian, tujuan dan instrumen kebijakan moneter, kini kamu akan beranjak untuk mempelajari materi kebijakan fiskal. Pada kegiatan belajar yang ke dua ini diharapkan kamu dapat memecahkan permasalahan kontekstual terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada APBN guna mengatasi permasalahan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan, kamu harus membaca materi pelajaran secara berulang-ulang dan mengerjakan setiap aktivitas belajar yang tersedia. Buatlah catatan kecil untuk materi yang belum kamu pahami dan tanyakan kepada tutor atau fasilitator. Selamat belajar.

B. Uraian Materi Pembelajaran

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat akan berperan mendukung kestabilan perekonomian. Secara terperinci, tujuan kebijakan fiskal dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas ekonomi
Kestabilan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari stabilnya harga-harga barang dan/atau jasa dan kestabilan nilai tukar rupiah.
- b. Meningkatkan produk nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi
Kebijakan fiskal diterapkan dengan mengubah jumlah belanja pemerintah. Saat kondisi perekonomian mengalami kelesuan jumlah produksi nasional cenderung menurun. Dalam kondisi seperti ini pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa. Penambahan anggaran ini akan mendorong keberlangsungan dan peningkatan produksi perusahaan. Dengan meningkatnya produksi perusahaan ini maka perekonomian akan kembali normal lagi.
- c. Menstabilkan Harga barang

Kenaikan harga barang tertentu dapat diakibatkan oleh kurangnya jumlah produksi dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini pemerintah akan melakukan impor barang yang bersangkutan. Dengan melakukan kegiatan impor ini harga barang tersebut kembali normal. Dengan melakukan impor maka jumlah pengeluaran pemerintah akan bertambah.

d. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan

Pendapatan negara berpengaruh pada usaha pemerataan pendapatan masyarakat. Pendapatan utama pemerintah dari sektor pajak, akan digunakan untuk membantu pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan harapan adanya pembangunan di daerah tersebut kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan, sehingga kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berkurang.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Banyak kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kelesuan perekonomian negara. Dewasa ini pemerintah mengadakan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi agar tercapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah sistem perpajakan dan politik anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sistem perpajakan

Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumberdaya yang ada di sector rumah tangga dan dunia usaha ke sector pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib member balas jasa langsung. Dengan menggunakan sarana perpajakan, pemerintah dapat mengatur kebijakan ekonomi. Dengan menaikkan tariff pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya jika tariff pajak dikurangi pemerintah bermaksud member kesempatan perusahaan berinvestasi, sekaligus meningkatkan konsumsi.

b. Politik anggaran

Politik anggaran dapat dilakukan oleh pemerintah melalui APBN. Politik anggaran dapat dikategorikan menjadi:

1) .Politik Anggaran Surplus

Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.

2) Politik Anggaran Defisit

Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan.

3) Politik Anggaran Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu keduanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.

Dampak Kebijakan Fiskal Bagi Perekonomian Indonesia

- Memengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara
- Meningkatnya kegiatan perekonomian
- Membayar utang pemerintah dan program pemerintah
- Terlaksananya pembangunan fasilitas publik
- Pemerataan distribusi pendapatan

RANGKUMAN

1. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.
2. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: kebijakan moneter kontraktif/kebijakan uang ketat-mengurangi JUB. Dan kebijakan moneter ekspansif/kebijakan moneter uang longgar- menambah JUB.
3. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga.
4. Tujuan kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah; menjaga stabilitas harga; meningkatkan kesempatan kerja; memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran
5. Instrumen Kebijakan Moneter terdiri dari: operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation); Politik Diskonto (Disconto Policy); Cadangan kas minimum; Kebijakan kredit selektif dan himbaun moral
6. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi
7. Tujuan kebijakan fiskal diantaranya menjaga stabilitas ekonomi; meningkatkan produk nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi; menstabilkan harga barang; dan menciptakan pemerataan distribusi pendapatan.
8. Instrumen kebijakan fiskal adalah sistem perpajakan dan politik anggaran (surplus, defisit dan berimbang).



Daftar Pustaka

Mulyani, Endang&Wahyuni, Daru. 2007. *PengetahuanSosialEkonomi 2 SMA / MA Kelas XI*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sutarno, dkk. 2012. *Ekonomi 2 untukKelas XI SMA dan MA*. Solo : PT. TigaSerangkai

Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sukirno, Sadono. (2004). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE

S, Alam. 2014. *Buku ekonomi SMA kelas XI*. Jakarta: Esis

Budiono. (1994). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE

Djojohadikusumo, Sumitro. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Kusumawardani,Dewi.2009. *Ekonomi untuk SMA kelas XI*. Jakarta:Pusat perbukuan departemen pendidikan nasional

Mardiasmo. (2015). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi

LEMBAR KERJA SISWA - LKS

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Sub Tema : Kebijakan Moneter
Pembelajaran ke : 1
Alokasi Waktu : 1 x 2 Jp @ 45 menit

Petunjuk Kerja

- 1) Kerjakanlah secara kelompok!
- 2) Diperbolehkan mencari sumber informasi dari manapun – termasuk buku sumber pelajaran.
- 3) Konsultasikan dan diskusikan dengan guru dalam mengerjakan tugas
- 4) Persentasikan hasil kerjamu di kelas sesuai dengan kesepakatan dengan guru
- 5) Kumpulkan hasil kerja kepada guru mata pelajaran ekonomi

ANALISA VIDEO:

Disajikan Video mengenai “Mengenal Kebijakan Moneter Bank Indonesia” dengan panduan pertanyaan kunci untuk diisi point-point penting dalam video. Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=KMPnVroI2vE>

TUGAS:

- 1) Tuliskanlah point-point pokok yang kamu tonton dalam video!?
- 2) Rumuskanlah beberapa pertanyaan setelah kamu menonton Video!?

----- Pembahasan atas Penugasan Analisa Video -----

Lembar Pengamatan Kelompok

Bacalah artikel/berita mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia pada saat pandemik Covid 19 yang sudah disediakan dengan pembagian sebagai berikut:

- A. Kelompok I dan VI dengan judul **Ini 5 Kebijakan Moneter Bank In**
- B. Kelompok II dan III dengan judul **Kebijakan Moneter di Tengah Pandemi Covid-19**
- C. Kelompok IV dan V dengan judul **Strategi Indonesia dalam Menghindari Krisis Ekonomi di Masa Pandemi.**

Setelah kamu selesai membaca artikel dengan seksama, coba diskusikan di dalam kelompok dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan diskusi untuk setiap kelompok:

1. Rumuskanlah pokok-pokok masalah yang diulas pada artikel, secara khusus identifikasi kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah di masa Pandemi Covid-19!?
2. Berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarkannya kebijakan moneter oleh pemerintah di masa khusus, yaitu saat Pandemi Covid 19!?
3. Dari artikel yang sudah kamu baca, analisislah apakah kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah melalui bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian yang baik bagi Indonesia di masa Pandemi Covid 19!?

Rumuskan dan tuliskan jawaban atas hasil diskusi kelompok pada selembar kertas untuk dijadikan sebagai bahan presentasi di depan kelas.

----- Presentasi Hasil dan Diskusi Kelompok dalam Forum Besar -----

ARTIKEL 1:

Ini 5 Kebijakan Moneter Bank Indonesia Atasi Dampak Virus Corona

[Feni Freycinetia Fitriani](#) - *Bisnis.com* 02 Maret 2020 | 15:24 WIB

Lima kebijakan BI ini untuk menjaga ekonomi dari dampak virus corona yang telah menjangkiti dua pasien ini, termasuk kebijakan pemangkasan GWM rupiah dan valas.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengumumkan lima kebijakan untuk melawan dampak virus corona, setelah pemerintah mengkonfirmasi dua pasien pertama di Tanah Air.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan virus corona sejak akhir Januari lalu dan pengaruhnya ke sektor-sektor penting, seperti pasar keuangan, pariwisata, perdagangan dan lainnya.

Untuk itu, dia menegaskan BI akan menjalankan lima kebijakan untuk menangkal dampak virus corona di Indonesia. *Pertama*, BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan.

"*Triple intervention* agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai fundamental dan mengikuti pasar. Strategi intervensi di pasar spot, DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder," ungkap Perry dalam konferensi pers, Senin (3/2/2020).

Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan mengawasi pasar.

Kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8 persen dari DPK sekarang 4 persen dari DPK.

Perry menegaskan kebijakan ini berlaku 16 Maret 2020. Dia memperkirakan penurunan GWM valas akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan jumlahnya sebesar US\$3,2 miliar.

"kita harapkan ini semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya

Kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar valas.

Ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Setelah terjadi Covid-19, eksportir dan importir kesulitan melakukan kegiatan.

Tidak hanya logistik distribusi, biasanya impor dari China kalau impor dari negara lain biaya impor termasuk harga mahal.

"Dengan penurunan 50 bps diharapkan mempermudah dunia usaha melakukan kegiatan ekspor impor dengan biaya lebih murah. penurunan GWM bank2 membiaya ekspor impor sekaligus mengkompensasi kenaikan biaya perdagangan," tegas Perry.

Perry menambahkan BI akan bertemu pemerintah, perbankan dan dunia usaha. Dia berharap penurunan 50 bps benar-benar disalurkan untuk pembiayaan ekspor impor. Kebijakan ini akan diimplementasikan 1 April 2020 dan akan berlaku selama 9 bulan ke depan.

Keempat, BI memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk *domestic non-delivery forward* (DNDF).

Perluasan bagi investor asing melepas SBN dan memasukkan ke rekening di Indonesia atau rekening dalam rupiah, bisa digunakan seperti underlying transaksi untuk membeli DNDF.

"Tidak perlu lindung nilai off shore NDF. Bisa lindung nilai DNDF dari rupiah yang mereka lepas."

Perry yakin komitmen investor tetap kuat sekarang di tengah meningkat ketidakpastian pasar keuangan global.

Kelima, BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. "Tidak perlu bank global, sebagian investor global telah menggunakan bank kustodian domestik."

Terakhir, Perry menuturkan BI akan menghargai berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah dalam penanganan dampak virus corona ke ekonomi Indonesia. BI akan terus menghargai independensi OJK dan pemerintah.

"BI terus memantau pasar keuangan dan perekonomian termasuk dalam dampak Covid-19 memaksimalkan bauran kebijakan."

Sumber: <https://finansial.bisnis.com/read/20200302/11/1207877/ini-5-kebijakan-moneter-bank-indonesia-atasi-dampak-virus-corona->

ARTIKEL 2:

Kebijakan Moneter di Tengah Pandemi Covid-19

Ajeng Luthfi - 28 Desember 2020 21:52

Pandemi yang kita ketahui sejak bulan Maret tahun 2020 benar-benar menggemparkan seluruh sektor. Sektor ekonomi khususnya dalam peranannya pemerintah juga berusaha untuk mengambil tindakan serta kebijakan yang akan ditangani dalam menghadapi pandemic COVID-19. Seluruh masyarakat dari berbagai kalangan juga mengalami dampak dari pandemic ini. Banyak yang rugi karena hasil penjualannya berkurang bahkan sampai "dirumahkan" oleh pihak kantor karena kerugian ditengah pandemic. Dalam hal ini khususnya sektor ekonomi yakni digemparkan oleh peristiwa turunnya harga kurs rupiah terhadap dollar, kemudian terjadi resesi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di seluruh negara yang juga terkena pandemic COVID-19. Kemudian bagaimana tindakan atau kebijakan apa yang akan diambil pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam menangani masalah tersebut.

Sejak pandemic COVID-19 muncul di Indonesia angka dari penyebaran yang terjadi terus bertambah sejak bulan Maret, akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terutama di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini diberlakukan bulan April. Kemudian dampak apa yang terjadi setelah kebijakan ini diterapkan terutama pada sektor ekonomi. Dampaknya yakni posisi arus modal keluar Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan nilai Rp145,28 triliun, dua kali lebih besar dibandingkan dengan krisis keuangan global tahun 2008 yang bernilai Rp67,9 triliun hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Begitupula pasar saham yang juga terkena dampak dari pandemic yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semenjak publikasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan sempat anjlok hingga menyentuh posisi terendahnya yakni 3.937,632 pada 24 Maret 2020. Pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada 15 Maret 2020 sebesar 10 bps tampaknya hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap IHSG. Dikutip Baker et.al (2020) menurutnya tidak ada wabah penyakit menular sebelumnya yang berdampak besar pada pasar saham sekuat pandemic COVID-19 karena pandemic ini memiliki implikasi serius bagi kesehatan masyarakat dan persebaran informasi saat ini yang sangat cepat didapatkan.

Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah memang menekan angka penyebaran dari COVID-19 namun banyak sektor yang terkena dampaknya dari penerapan kebijakan PSBB ini terutama sektor ekonomi. Kemudian bagaimana Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dapat bekerjasama dalam menangani masalah tersebut. Pada tanggal 26 Maret tahun 2020, Indonesia mengikuti konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa G20 secara virtual untuk membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Terdapat tiga poin utama yang disepakati dalam konferensi tersebut. Pertama, memfokuskan kebijakan dalam negeri dan kerjasama multilateral untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan dan kesehatan. Kedua mendorong sinergisitas otoritas moneter, fiskal dan sektor keuangan. Ketiga, mendesak peran lembaga Internasional (IMF dan World Bank) untuk meningkatkan pendanaan dalam upaya mengatasi keketatan likuiditas USD secara global. Dalam point tersebut Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah bersepakat untuk berkoordinasi melakukan pengendalian ekonomi serta mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19.

Dari sisi kebijakan moneter Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya mitigasi dampak COVID-19. Bank Indonesia dalam upayanya salah satunya yakni mengendalikan harga rupiah agar tetap stabil, dengan mengklaim terus melakukan intervensi pasar baik di spot, DNDF maupun pembelian Surat Berharga Nasional (SBN) dari pasar sekunder. Selain itu Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk melakukan kebijakan quantitative easing, salah satunya menurunkan GWM (Giro Wajib Minimum). Bank Indonesia telah memberikan injeksi kepada perbankan sebesar hamper 300 triliun sejak awal tahun 2020. Berbagai stimulus dan kebijakan telah dilakukan oleh Bank Indonesia hal tersebut sepertinya memberikan sedikit cahaya serta kepastian bagi para pelaku pasar tentang gambaran proyeksi ekonomi Indonesia ke depannya. Dengan demikian, tekanan ditengah pandemic COVID-19 ke pasar keuangan, pasar modal dan sektor riil diharapkan menjadi lebih terkendali.

Sumber: <https://www.kompasiana.com/ajengluthfi3048/5fe9f13e8ede480a0d642182/kebijakan-moneter-ditengah-pandemi-covid-19>

Strategi Indonesia dalam Menghindari Krisis Ekonomi di Masa Pandemi

Ghia Syifa Almukhlisah/SI Pendidikan Ekonomi/Universitas Negeri Jakarta 23 Oktober 2020 14:18

Tujuh bulan sudah kita hidup berdampingan dengan adanya [pandemi](#) Covid-19 di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah guna mensejahterakan kehidupan masyarakat ditengah pandemi ini. Mulai dari kebijakan memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kata lain bahwa anggaran perjalanan dinas atau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu bahkan tidak terlalu penting dan juga belanja apapun yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat harus dipangkas. Pemerintah juga membebaskan sementara PPh Pasal 21 dengan alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun. Selain itu juga, pemerintah harus mengalokasikan anggarannya untuk mempercepat pengentasan corona, baik dari sisi kesehatan maupun [ekonomi](#).

Dilihat dari sisi kebijakan [moneter](#) di Indonesia, Bank Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan moneter guna mendorong perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini. Dimana, pada tahun ini Indonesia telah memangkas suku bunga yang acuannya mencapai hingga 100 basis poin. Selain itu kebijakan insentif pelonggaran giro wajib minimum harian telah diperluas oleh Bank Indonesia dalam rupiah yang mencapai hingga 50 basis poin. Padahal pada awal mulanya hanya ditujukan kepada bank yang akan melakukan pembiayaan ekspor dan juga impor, ditambah juga dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) 2020 mengatakan jika kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia guna menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 itu adalah untuk mengantisipasi volatilitas nilai tukar dan agar aliran modal bisa tetap konsisten. Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan bank sentral ini merupakan salah satu inovasi yang telah disesuaikan dengan tekanan global, dengan harapan nantinya bisa diimplementasikan di negara berkembang lainnya.

Bank sentral di Indonesia juga diharuskan tetap menjaga angka inflasi agar tetap sesuai target, karena inflasi tidak hanya cukup diatur dengan suku bunga saja. Melainkan juga dapat diatur dengan mengontrol uang yang beredar dan juga menetapkan persediaan uang kas pada bank dengan semestinya. Dan kebijakan menjual surat-surat berharga, dengan misal Surat Utang Negara (SUN) juga bisa mengurangi tingkat inflasi nantinya.

Perry Warjiyo juga mengungkapkan berdasarkan pengalaman yang dimiliki Bank Indonesia, untuk suku bunga yang konsisten dan juga target inflasi yang sesuai dengan intervensi nilai tukar hingga aliran modal bisa ke negara berkembang termasuk ke Indonesia. Selain itu, ada juga kebijakan moneter untuk menstabilisasi harga dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan Makroprudensial juga bertujuan untuk membatasi tekanan/risiko sistemik secara luas untuk menghindari biaya yang besar apabila terjadi instabilitas di sistem keuangan, yang juga memiliki strategi memitigasi gejala/krisis di sektor keuangan.

Beliau juga menjelaskan bahwa ketika pandemi ini, ada aliran dana keluar secara terus menerus. Bank Indonesia intervensi pasar FX, obligasi pemerintah dan juga segera menurunkan suku bunga dan merelaksasi kebijakan makroprudensial. Dimana kebijakan makroprudensial yang dimaksud BI adalah dipangkasnya rasio loan to value (LTV) untuk sejumlah jenis kredit. Rasio pinjaman terhadap nilai adalah istilah keuangan yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengungkapkan rasio pinjaman terhadap nilai aset yang dibeli. Beliau mengatakan bahwa ini untuk membantu mengelola pergerakan kredit dan permintaan agregat hingga dapat membantu respons kebijakan suku bunga.

Indonesia dikatakan juga bisa meniru kebijakan moneter yang dijalankan oleh negara Amerika Serikat (AS) dan juga China, demi mengatasi dalam upaya pemulihan ekonomi dampak covid-19. Hal tersebut dikatakan oleh Gita Wirjawan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa dampak pada sektor riil akan dahsyat sekali, maka dari itu Indonesia seharusnya mempertimbangkan langkah-langkah kedepan secara extraordinary, dimana langkah extraordinary ini dikatakan sebagai langkah yang luar biasa dengan maksud pemerintah harus mengeluarkan kebijakan suku bunga kredit harus rendah, adanya penjaminan restrukturisasi, dan skala bantuan restrukturisasipun harus besar. Maksud dari restrukturisasi ini adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila kita tidak melakukan langkah yang luar biasa tersebut seperti penjelasan diatas, maka ekonomi di Indonesia nantinya akan mengalami kelumpuhan, dan para produsenpun dengan mayoritas

UMKM nantinya juga akan lumpuh. Dimana apabila perekonomian di Indonesia lumpuh, daya saing ekonomi dinegara kita akan berkurang, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Jika kita lihat diluar negeri rata-rata bantuan yang mereka berikan itu lebih dari sepuluh persen Produk Domestik Bruto (PDB), seperti bantuan yang diberikan pemerintah Singapura adalah 12,5 persen dari PDB, selain itu juga di Malaysia 11 persen dari PDB, sedangkan di Indonesia hanya 2,5 persen dari PDB. Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa bantuan dari pemerintah di Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan hal ini juga akan mengalami daya saing yang ketat jika kita tidak membantu daya beli dan daya produksi.

Maka dari itu, Gita Wirjawan selaku sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa Indonesia harus berani mengambil keputusan dengan meniru kebijakan moneter dari negara seperti Amerika Serikat dan China. Walaupun kita berusaha meniru dengan tujuan yang lebih baik, kita juga harus mempertimbangkan agar suku bunganya lebih rendah. Karena apabila sama dengan suku bunga pasar atau komersil akan tetap susah untuk membantu orang yang terdampak Covid-19. Dan pada intinya yang dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi ini adalah dengan adanya kecepatan dan ketetapan kebijakan pemerintah saat ini.

Selain itu juga, pak Gita Wirjawan juga menyarankan apabila pemerintah Indonesia nantinya akan menerapkan Kebijakan Moneter itu harus dilihat dari likuiditasnya. Jika dilihat dari pengumpulan pajak tahun lalu itu terbatas dibawah target, dan pada kuartal I pun pengumpulan pajak sangat terbatas. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sudah menunjukkan defisit di kuartal I, yakni sebesar Rp 70-80 triliun. Maka dari itu jikalau Indonesia diharuskan ngutang kembali juga memiliki keterbatasan. Dimana Indonesia sukses dengan meminjam USD 4,3 miliar di pasar luar negeri dengan bunga yang lebih rendah. Dan beliau berpendapat bahwa kalau Indonesia ingin meminjam lagi dari luar negeri akan lebih mahal, apalagi meminjam dari dalam negeri.

Sumber: <https://www.kompasiana.com/ghiasyifa2686/5f9283d78ede4869d117e2f2/strategi-indonesia-dalam-menghindari-krisis-ekonomi-di-masa-pandemi>

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Sub Tema : Kebijakan Fiskal
Pembelajaran ke : 2
Alokasi Waktu : 1 x 2 Jp @ 45 menit

Petunjuk Kerja

- 1) Kerjakanlah secara kelompok!
- 2) Diperbolehkan mencari sumber informasi dari manapun – termasuk buku sumber pelajaran.
- 3) Konsultasikan dan diskusikan dengan guru dalam mengerjakan tugas
- 4) Persentasikan hasil kerjamu di kelas sesuai dengan kesepakatan dengan guru
- 5) Kumpulkan hasil kerja kepada guru mata pelajaran ekonomi

ANALISA VIDEO:

Disajikan Video mengenai “Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia di tengah wabah Covid-19” dengan panduan pertanyaan kunci untuk diisi point-point penting dalam video.

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=klI3000qzKw&feature=youtu.be>

TUGAS:

- 1) Tuliskan point-point pokok yang kamu tonton dalam video!?
- 2) Rumuskanlah beberapa pertanyaan yang ingin setelah kamu menonton Video!?

----- **Pembahasan atas Penugasan Analisa Video** -----

Lembar Pengamatan Kelompok

Bacalah artikel/berita mengenai kebijakan Fiskal Pemerintah pada saat pandemik Covid 19 yang sudah disediakan dengan judul: “Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam Menghadapi Pandemi”

Setelah kamu selesai membaca artikel dengan seksama, coba diskusikan di dalam kelompok dengan panduan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan diskusi untuk setiap kelompok:

- 1) Identifikasikan pokok-pokok masalah yang diulas pada artikel, secara khusus terkait kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah di masa Pandemi Covid-19!?
- 2) Berdasarkan bacaan pada artikel, uraikan tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal oleh pemerintah di masa khusus, yaitu saat Pandemi Covid 19!?
- 3) Dari artikel yang sudah kamu baca, analisislah apakah kebijakan Fiskal yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia di masa Pandemi Covid 19!?

Rumuskan dan tuliskan jawaban atas hasil diskusi kelompok pada selembar kertas untuk dijadikan sebagai bahan presentasi di depan kelas.

----- **Presentasi Hasil dan Diskusi Kelompok dalam Forum Besar** -----

ARTIKEL:

Kebijakan Fiskal Pemerintah Yang Pruden Dalam Menghadapi Pandemi

Jakarta, 20 Mei 2020 - Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama 2020 beberapa negara menggambarkan secara nyata dampak wabah Covid-19 yang telah mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia, seperti Tiongkok (-6,8 persen), US (0,3 persen), Jerman (-2,3 persen), dan Singapura (-2,2 persen). Dalam merespon prospek pelemahan ekonomi global tersebut, beberapa negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan pelonggaran moneter dan paket kebijakan fiskal dengan skema yang progresif dan nilai yang signifikan. Pemerintah mewaspadaikan perkembangan ekonomi global saat ini dan telah merespon melalui kebijakan stimulus fiskal di dalam negeri yang diberikan untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan, insentif untuk sektor yang terdampak secara langsung, dan penguatan stabilitas keuangan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam publikasi APBN Kita edisi Mei 2020.

Pelemahan Pendapatan Negara sebagai dampak perlambatan ekonomi selama masa pandemik Covid-19 mulai terlihat

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan pertama triwulan kedua 2020 mengalami tekanan, dimana baru mencapai 31,21 persen dari target pada APBN-Perpres 54/2020 atau secara nominal berjumlah Rp549,51 triliun. Jumlah tersebut terealisasi dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing mencapai Rp434,33 triliun dan Rp114,50 triliun, serta realisasi dari Hibah sebesar Rp0,67 triliun.

Tekanan pada Pendapatan Negara terefleksi pada realisasi rendahnya penerimaan Pajak hingga akhir bulan April 2020 yang tumbuh negatif 3,1 persen (yoy) atau mencapai Rp376.67 triliun (30 persen dari target APBN-Perpres 54/2020). Beberapa sektor dominan seperti Perdagangan, Konstruksi & Real Estate, Pertambangan, dan Transportasi & Pergudangan mengalami kontraksi, meskipun beberapa sektor lainnya masih tumbuh seperti Jasa Keuangan dan Asuransi karena masih beroperasi selama pandemi Covid-19. Hampir semua jenis pajak tumbuh negatif selama periode Januari-April 2020, dimana PPh Badan terkontraksi negatif 15,23 persen akibat perlambatan ekonomi yang terlihat dari pertumbuhan negatif Setoran Masa dan Tahunan. Demikian juga PPh/PPN Impor terkontraksi negatif 8,90 persen seiring kontraksi kegiatan impor nasional. Dampak ekonomi dari Covid-19 mulai terefleksikan dalam penerimaan pajak, akibat perluasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini juga tercermin dari PPN DN yang hanya tumbuh 0,82 persen secara bruto, melambat dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Sinyal perlambatan penerimaan yang mulai terlihat di bulan April dan implementasi stimulus fiskal Covid-19 ini akan sangat mempengaruhi penerimaan di bulan-bulan berikutnya. Sebagai gambaran awal, penerimaan pajak untuk periode tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2020 sudah tumbuh sebesar negatif 28,57 persen.

Untuk penerimaan Kepabeanan dan Cukai, secara nominal realisasinya masih tumbuh sebesar Rp57,7 triliun atau 27,7 persen dari target APBN-Perpres 54/2020. Penerimaan ini didukung utamanya oleh penerimaan dari Cukai sebesar Rp36,2 triliun. Sementara itu, realisasi perdagangan internasional sampai dengan bulan April 2020 tumbuh negatif, dimana realisasi Bea Masuk tumbuh negatif 2,64 persen (yoy) atau sebesar Rp11,5 triliun dan realisasi Bea Keluar tumbuh negatif 34,97 persen (yoy) atau sebesar Rp0,9 triliun. Kontraksi yang cukup dalam pada pertumbuhan perpajakan perdagangan internasional ini terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mineral nikel dan tembaga sebagai dampak mewabahnya Covid-19 di berbagai negara. Hal ini juga tercermin dari Neraca Perdagangan Indonesia di bulan April yang mengalami defisit sebagai akibat dari tekanan defisit di sisi migas maupun non migas.

Kemudian di sisi PNBP, realisasinya sampai dengan bulan April 2020 tercatat sebesar Rp114,50 triliun atau 38,5 persen dari target APBN-Perpres 54/2020 yang ditopang oleh penerimaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dimana terdapat pergeseran pembayaran dividen BUMN menjadi lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, tekanan terhadap PNBP berasal dari harga komoditas yang rendah, seperti harga minyak dan harga batubara yang menyebabkan penerimaan dari PNBP belum optimal. Harga minyak yang cenderung turun di kisaran USD25 sampai USD30 per barel yang menyebabkan PNBP minyak bumi dan gas akan mengalami penurunan.

Penguatan Belanja Negara untuk penanganan Covid-19

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2020 sebesar Rp623,98 triliun atau telah mencapai sekitar 23,87 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Realisasi tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 3,4 persen (yoy) atau sebesar Rp382,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tumbuh negatif 8,0 persen (yoy) atau sebesar Rp241,45 triliun.

Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial (bansos) mencapai Rp61,4 triliun dan belanja modal yang mencapai Rp20,7 triliun. Belanja bansos tumbuh sebesar 13,7 persen (yoy) untuk mendukung Jaring Pengaman Sosial (SSN) menghadapi pandemi Covid-19, melalui pemberian bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Penyaluran Bansos Sembako untuk keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, serta Penyaluran Bansos Tunai bagi keluarga penerima manfaat di luar wilayah Jabodetabek. Peningkatan kinerja realisasi belanja tersebut dapat mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan belanja produktif serta melindungi masyarakat miskin dan rentan. Kemudian, belanja modal tumbuh 30,6 persen (yoy) utamanya untuk kegiatan terkait pengadaan Alarmsus di Polri dan penyediaan Alkes pada RS Polri dalam rangka percepatan pengendalian Covid-19. Selain itu, sisi belanja yang mengalami pelemahan adalah belanja barang tumbuh negatif 18,8 persen (yoy) sebagai akibat dampak pandemi yang berimbas kepada pelaksanaan kegiatan. Dalam meningkatkan kualitas belanja, Pemerintah mulai mengendalikan belanja dengan belanja multiyears dan pengendalian nilai kontrak. Hal ini tercermin pada menurunnya nilai belanja yang dikontrakkan dan realisasi pagu hingga bulan April 2020 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Adapun realisasi TKDD sampai dengan akhir April 2020 telah mencapai Rp241,45 triliun atau 31,66 persen dari pagu APBN-Perpres 54/2020. Realisasi ini tumbuh negatif 8,0 persen (yoy) yang terutama disebabkan oleh adanya realokasi dan refocusing anggaran belanja untuk percepatan penanganan Covid-19, seperti untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga medis, berbagai jenis bantuan sosial, dan insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menjaga keberlanjutan fiskal untuk kesejahteraan masyarakat terutama di tengah pandemi

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga April 2020 mencapai Rp74,47 triliun atau sekitar 0,44 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga April 2020 mencapai Rp221,84 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 53,58 persen (yoy), terutama bersumber dari pembiayaan utang.

Ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 ini sempat menyebabkan sentimen negatif di pasar keuangan, termasuk di Indonesia pada awal penyebaran di bulan Maret lalu. Seiring dengan perkembangan, pada bulan April pasar keuangan dinilai kembali stabil meskipun masih diwaspadai volatilitasnya. Pemerintah mengambil kesempatan dari kondisi tersebut dengan menerbitkan SUN dalam valuta asing (global bonds) pada bulan April 2020 sebesar USD4,3 miliar atau ekuivalen Rp 68,8 triliun (dengan kurs Rp16.000) sebagai strategi pembiayaan APBN 2020 untuk menopang pembiayaan akibat adanya pandemi Covid-19.

Disamping itu, untuk memperkuat pasar domestik, Pemerintah telah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 190/KMK.08/2020 antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang baru saja ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam ketentuan yang terdapat pada SKB tersebut, BI dapat membeli Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang yang bersifat tradable di pasar perdana. Selama bulan April, SKB tersebut telah diimplementasikan sebanyak dua kali, yaitu pada rangkaian lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanggal 21 April 2020 dan lelang Surat Utang Negara (SUN) tanggal 28 April 2020.

Pemerintah juga sudah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam PP nomor 23 tahun 2020 sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan

kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pandemi Covid-19 yang masih sulit diprediksi ini menyebabkan kondisi perekonomian semakin melemah. Pemerintah yang berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia, memproyeksikan angka defisit kembali melebar di angka 6,27 persen terhadap PDB. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas penanganan Covid-19, termasuk di dalamnya untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam menghadapi ketidakpastian terutama akibat pandemi Covid-19, Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan. Informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Tlp: (021) 3865330.

* * *

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-kebijakan-fiskal-pemerintah-yang-pruden-dalam-menghadapi-pandemi/>

EVALUASI BELAJAR

Tes Formatif dan Tes Sumatif

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021

TES FORMATIF

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Sub Tema : Kebijakan Moneter
Pembelajaran ke : 1
Alokasi Waktu : 15 menit

Petunjuk Kerja

- 1) Kerjakanlah secara individu!
- 2) Kumpulkan hasil kerja kepada guru mata pelajaran ekonomi

Pertanyaan

1. Berdasar pada pendapat ahli yang sudah kita pelajari, menurut pendapat pribadimu apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter !

Jawab

.....

.....

.....

.....

2. Di indonesia kebijakan moneter perlu dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk apa?

Jawab

.....

.....

.....

.....

3. Apa yang dimaksud dengan *disconto policy*?

Jawab

.....

.....

.....

4. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi dan deflasi melalui kebijakan *Open market operation*?

Jawab

.....

.....

.....

5. Apa yang dimaksud dengan kebijakan cadangan kas minimum. Sasarannya untuk siapa?

Jawab

.....

.....

.....

6. Bagaimana kebijakan kredit selektif dilakukan dalam mengatasi deflasi maupun inflasi?

Jawab

.....

.....

.....

Pedoman Penskoran

Uraian Jawaban	Skor
<p>1. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah sehingga perekonomian menjadi lebih baik dan masyarakat sejahtera.</p>	10
<p>2. Tujuan kebijakan moneter di Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga stabilitas perekonomian 2. Menjaga stabilitas harga 3. Meningkatkan kesempatan kerja 4. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran 5. Mempertahankan iklim investasi 6. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang 7. Menurunkan laju inflasi 	10
<p>3. Politik Diskonto (Disconto Policy) adalah kebijakan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga Bank. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Pengurangan jumlah uang beredar dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.</p>	20
<p>4. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) adalah kebijakan yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti obligasi (ORI) dan sertifikat Bank Indonesia.</p>	20
<p>5. Cadangan kas minimum adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas (<i>cas ratio</i>) minimum bank umum. Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.</p>	20
<p>6. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara menetapkan persyaratan kredit ketat dalam memperoleh kredit dari Bank. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Jadi ketika kebijakan ini di berlakukan maka akan mengurangi kesempatan bagi para peminjam dalam memperoleh uang dari pinjaman Bank dan dampaknya uang yang beredar di masyarakat akan berkurang.</p>	20
TOTAL NILAI	100

TES FORMATIF

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Sub Tema : Kebijakan Fiskal
Pembelajaran ke : 2
Alokasi Waktu : 15 menit

Petunjuk Kerja

- 1) Kerjakanlah secara individu!
- 2) Kumpulkan hasil kerja kepada guru mata pelajaran ekonomi

Pertanyaan:

1. Dengan bahasamu sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan Fiskal!?

Jawab
.....
.....
.....
.....

2. Di masa pandemi Covid 19 ini, uraikan 3 kebijakan FISKAL dari pemerintah untuk mempertahankan kondisi perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk!?

Jawab
.....
.....
.....
.....

3. Apa tujuan/peran dikeluarkannya kebijakan kebijakan Fiskal oleh pemerintah !?

Jawab
.....
.....
.....
.....

4. Sebutkan dan jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai instrument-instrumen dalam kebijakan fiskal!?

Jawab
.....
.....
.....
.....

5. Uraikanlah dampak positif dari dikeluarkannya kebijakan Fiskal oleh Pemerintah!?

Jawab
.....
.....
.....
.....

Pedoman Penskoran

Uraian Jawaban	Skor
1. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan untuk memperbaiki keadaan ekonomi.	20
2. Kebijakan Fiskal Pemerintah di masa Pandemi Covid 19: a. Refocusing dan realokasi APBN dan APBD di bidang kesehatan, bantuan sosial dan intensif ekonomi bagi UMKM b. Memangkan anggaran APBN dan APBD untuk perjalanan dinas, rapat, belanja dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas. c. Percepatan realisasi dana desa terutama untuk padat karya tunai. d. Percepatan kartu prakerja untuk mengatasi persoalan PHK	20
3. Tujuan dikeluarkan kebijakan Fiskal adalah: a. Menjaga stabilitas ekonomi b. Meningkatkan produk nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi c. Menstabilkan harga barang d. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan	20
4. Instrumen-instrumen kebijakan Fiskal: a. Perpajakan b. Subsidi c. Belanja Pemerintah d. Pinjaman Publik	20
5. Dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia: a. Memengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara b. Meningkatnya kegiatan perekonomian c. Membayar utang pemerintah dan program pemerintah d. Terlaksananya pembangunan fasilitas publik e. Pemerataan distribusi pendapatan	20
TOTAL NILAI	100

TES SUMATIF

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Alokasi Waktu : 60 menit

Petunjuk Kerja

- 1) Bentuk soal adalah pilihan ganda (10) dan essay (5).
- 2) Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang kamu anggap benar pada soal pilihan ganda.
- 3) Kerjakanlah secara individu dan jujur!
- 4) Periksa kembali pekerjaanmu sebelum dikumpulkan
- 5) Kumpulkan hasil kerja kepada guru mata pelajaran ekonomi

Pilihan Ganda

1. Kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar adalah. . . .
 - A. Fiskal
 - B. Diskonto
 - C. Pasar terbuka
 - D. Kredit selektif
 - E. Moneter
2. Kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah guna mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut kebijakan moneter. . . .
 - A. Kuantitatif
 - B. Kontraktif
 - C. Ekspansif
 - D. Kualitatif
 - E. Kredit selektif
3. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Dengan adanya investasi maka perusahaan bisa membuka cabang lain. Gambaran di atas adalah salah satu tujuan kebijakan moneter, yaitu. . . .
 - A. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
 - B. Menjaga stabilitas harga
 - C. Meningkatkan kesempatan kerja
 - D. Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran
 - E. Memperlancar arus kas negara
4. Mengatasi deflasi dapat dilakukan melalui kebijakan moneter yaitu dengan politik diskonto. Hal ini dapat dilakukan dengan cara. . . .
 - A. Menjual surat-surat berharga
 - B. Membeli surat-surat berharga
 - C. Menurunkan cadangan kas minimum
 - D. Menurunkan tingkat suku bunga bank umum
 - E. Menaikkan tingkat suku bunga bank umum
5. Pemerintah dapat mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat dengan menggunakan kebijaksanaan operasi pasar terbuka, yaitu. . . .
 - A. Membuka pasar baru
 - B. Operasi terhadap pedagang di pasar
 - C. Membeli surat berharga
 - D. Menjual surat berharga ke masyarakat
 - E. Menurunkan tingkat suku bunga

6. Kebijakan pemerintah melalui APBN untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dinamakan
 - A. Fiskal
 - B. Diskonto
 - C. Pasar terbuka
 - D. Kredit selektif
 - E. Moneter

7. Kebijakan fiskal yang berhubungan dengan menambah jumlah uang di masyarakat, disebut kebijakan fiskal
 - A. Kuantitatif
 - B. Ekspansif
 - C. Kontraktif
 - D. Kualitatif
 - E. Kredit selektif

8. Pendapatan pemerintah melalui pajak dapat digunakan untuk membantu pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Dengan harapan pembangunan di daerah tersebut kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami peningkatan. Gambaran di atas adalah salah satu tujuan kebijakan moneter, yaitu
 - A. Menjaga stabilitas ekonomi
 - B. Meningkatkan produk nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi
 - C. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan
 - D. Menstabilkan Harga barang
 - E. Mengendalikan harga

9. Melalui penerimaan yang disusun di APBN, pemerintah mampu menentukan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Instrumen kebijakan fiskal yang dimaksud adalah.....
 - A. Politik anggaran
 - B. Sistem perpajakan
 - C. Politik diskonto
 - D. Politik pasar terbuka
 - E. Cadangan kas minimum

10. Sebuah kebijakan anggaran di mana jumlah penerimaan dan pengeluaran sama dinamakan kebijakan anggaran.....
 - A. Defisit
 - B. Surplus
 - C. Berimbang
 - D. Kontinue
 - E. Dinamis

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian kebijakan moneter secara sederhana menurut pendapatmu!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh bank sentral!
4. Bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan moneter melalui instrumen cadangan minimum!
5. Apa yang dimaksud dengan kebijakan anggaran defisit dalam kebijakan fiskal!

Kunci Jawaban

No	Uraian Jawaban/Kata Kunci	Skor
1	E	5
2	B	5
3	C	5
4	D	5
5	D	5
6	A	5

7	B	5
8	C	5
9	B	5
10	E	5
11	Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian	10
12	Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) atau dapat dikatakan kebijakan moneter uang longgar (Easy Money Policy) adalah kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar	10
13	Kebijakan pemerintah melalui bank indonesia untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti obligasi (ORI) dan sertifikat Bank Indonesia	10
14	Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cas ratio) minimum bank umum. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan	10
15	Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan di mana jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran	10
	Total Skor	100

LEMBAR PENILAIAN

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal



Dibuat Oleh:

ALBERTUS BAMBANG BUNTORO, Gr.SE.

**SMA YPPK SEMINARI PETRUS VAN DIEPEN
AIMAS – SORONG – PAPUA BARAT
2021**

Satuan Pendidikan : SMA YPPK Seminari Petrus van Diepen
 Kelas/Semester : XI / Ganjil
 Tema : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
 Alokasi Waktu : 2 x 2 Jp @ 45 menit

PENILAIAN

PENILAIAN SIKAP

- a. Teknik penilaian : Non Tes (Observasi)
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
- c. Rubrik

Rubrik Penilaian:

1) Kegiatan Belajar Mengajar

No	Nama	Aspek yang dinilai			Jumlah Skor	Nilai	Predikat
		Kedisiplinan	Keaktifan	Kerjasama			
1	...						
2	...						
3	...						
4	...						
5	...						
...	...						

Keterangan:

Aspek Kedisiplinan

- Skor 3 = mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tepat waktu
- 2 = mengerjakan tugas sesuai prosedur/tepat waktu
- 1 = tidak mengerjakan tugas sesuai prosedur dan tidak tepat waktu

Aspek Keaktifan

- Skor 3 = melakukan pengukuran, pencatatan dan urun pendapat/solusi
- 2 = melakukan pengukuran/ pencatatan/urun pendapat atau solusi
- 1 = tidak melakukan pengukuran, pencatatan dan tidak urun pendapat/solusi

Aspek Kerjasama

- Skor 3 = melakukan pengamatan, pencatatan dan penyelesaian tugas secara bersama
- 2 = melakukan pengamatan / pencatatan / penyelesaian tugas secara bersama
- 1 = tidak melakukan pengamatan / pencatatan / penyelesaian tugas secara individual

Skor maksimal = 9

Pedoman Pensekoran:

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ perolehan}{Skor\ maksimal} \times 100$$

$$Predikat = \frac{Jumlah\ skor\ perolehan}{Skor\ maksimal} \times 4$$

Kriteria Predikat:

Nilai	Predikat
3,34 – 4,00	A
2,34 – 3,33	B
1,34 - 2,33	C
0 – 1,33	D

2) Penilaian Presentasi

No	Nama	Aspek Penilaian			Jumlah Skor	Nilai	Predikat
		Sistematika penyampaian	Wawasan	Keberanian			
1	...						
2	...						
3	...						
4	...						
5	...						
...	...						

Keterangan :

Sistematika Penyampaian

- Skor 3 = ketepatan dalam pemilihan kata, penyampaian runtun, dan memberikan kesimpulan
 2 = ketepatan dalam pemilihan kata/ penyampaian runtun/ memberikan kesimpulan
 1 = tidak ketepatan dalam pemilihan kata/ penyampaian runtun/ memberikan kesimpulan

Aspek Wawasan

- Skor 3 = mampu menjelaskan dengan lancar, menjawab pertanyaan dengan tepat, dan mampu mempertahankan hasil analisisnya
 2 = mampu menjelaskan dengan lancar/ menjawab pertanyaan dengan tepat/ mampu mempertahankan hasil analisisnya
 1 = tidak mampu menjelaskan dengan lancar/ menjawab pertanyaan dengan tepat/ mampu mempertahankan hasil analisisnya

Keberanian

- Skor 3 = tidak ragu dalam menyampaikan hasil diskusi, tidak gemetar, dan tidak saling menunjuk teman
 2 = tidak ragu dalam menyampaikan hasil diskusi/ tidak gemetar/ tidak saling menunjuk teman
 1 = ragu dalam menyampaikan hasil diskusi/ gemetar/ saling menunjuk teman

Skor Maksimal 9

Pedoman Penskoran:

$$Nilai = \frac{Jumlah\ skor\ perolehan}{Skor\ maksimal} \times 100$$

$$Predikat = \frac{Jumlah\ skor\ perolehan}{Skor\ maksimal} \times 4$$

Kriteria Predikat:

Nilai	Predikat
3,34 – 4,00	A
2,34 – 3,33	B
1,34 - 2,33	C
0 – 1,33	D

----- SELESAI – TERIMAKASIH -----